

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kemiskinan

NAMA INDIKATOR

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

TAHUN

2017

KONSEP

- **PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS** adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota tentang PSK, PKL, dan PMKS.
- **PERDA (Peraturan Daerah)** adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
- **PSK (Pekerja Seks Komersial)** adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
- **PKL (Pedagang Kaki Lima)** adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- **PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)** adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

RUJUKAN

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Peraturan Daerah

UNIT

0

KEGUNAAN

Mengetahui keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS di Kabupaten Pemalang.

INTERPRETASI

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS di Kabupaten Pemalang akan menciptakan keindahan, keamanan, kedisiplinan, kenyamanan dan kebersihan di wilayah Kabupaten Pemalang.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Bagian Hukum

DOKUMEN

LPPD

